

**MERAWAT KERAGAMAN BERAGAMA
(RESPON AKTIVIS MAHASISWA MUSLIM DI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP WACANA MODERASI BERAGAMA)**

Hairul Hudaya

UIN Antasari Banjarmasin

hairulhudaya@uin-antasari.ac.id

Husaini

UIN Antasari Banjarmasin

husaini304@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan respon aktivis mahasiswa Muslim Kalimantan Selatan terkait wacana moderasi beragama yang diinisiasi Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengetahui adanya potensi konflik dan integrasi di tengah masyarakat. Sikap beragama yang terlalu ke kanan akan melahirkan tipe beragama radikal dan terlalu kiri akan menghasilkan sikap liberal. Hal ini cukup menguatirkan jika berakhir dengan konflik. Sementara moderat adalah jalan tengah antara kedua sikap tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran aktivis mahasiswa Muslim terkait moderasi beragama yang mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Subjek penelitian ini adalah aktivis mahasiswa yang ada di empat kampus yakni UIN Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai dan STAI Rakha Amuntai. Data digali dengan teknik wawancara mendalam dan diolah dengan tiga tahap yakni reduksi data, display data dan penarikan simpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek respon, meski mayoritas tidak mengetahui moderasi beragama namun mereka setuju dengan wacana tersebut dalam pengertian toleransi. Pada aspek sikap beragama, mahasiswa sangat moderat. Sedang pada integritas dan konflik baik intra maupun antar agama diselesaikan dengan saling komunikasi dan toleransi namun bila terjadi konflik maka pemerintah turut menyelesaikannya. Faktor penyebab konflik adalah perbedaan pandangan keagamaan yang berakibat pada gesekan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih lanjut sikap moderasi beragama di Perguruan Tinggi agama maupun umum karena mayoritas mahasiswa yang diteliti tidak memahami arah moderasi beragama. Kata Kunci: moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya

Abstract

This research aims to map the response of South Kalimantan Muslim student activists regarding the discourse on religious moderation initiated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to determine the potential for conflict and integration in society. A religious attitude that is too right will give birth to a radical religious type and one that is too left will produce a liberal attitude. This is quite worrying if it ends in conflict. While moderate is a middle ground between these two attitudes. This research is a qualitative descriptive study that seeks to describe and analyze the thoughts of Muslim student activists regarding religious moderation which includes national commitment, tolerance, non-violence and accommodating to local culture. The subjects of this research were student activists on four campuses, namely UIN Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai and STAI Rakha Amuntai. Data was extracted using in-depth interview techniques and processed in three stages, namely data reduction, data display and drawing conclusions. This research found that in the response aspect, although the majority did not know about religious moderation, they agreed with the discourse in terms of tolerance. In the aspect of religious attitudes, students are very moderate. Meanwhile, integrity and conflict, both intra and inter-religious, are

resolved through mutual communication and tolerance, but if a conflict occurs, the government will help resolve it. The factor causing conflict is differences in religious views which result in social friction. This research recommends the need for further socialization of religious moderation attitudes in religious and general universities because the majority of students studied do not understand the direction of religious moderation.

Keywords: religious moderation, national commitment, tolerance, non-violence, accommodating to culture



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang plural, bangsa yang majemuk dalam segala hal, termasuk agama. Hal ini merupakan aset bangsa yang dapat bernilai positif dan negatif. Nilai positif itu akan dimiliki jika setiap anak bangsa memiliki kematangan dalam memahami hakikat agama yang mereka peluk serta kedewasaan dalam mengambil sikap beragama sebagai buah dari pemahaman beragama yang benar. Konflik keagamaan dengan cara kekerasan seringkali disebabkan karena adanya klaim kebenaran dari masing-masing kelompok dan mengindahkan kebenaran dalam keyakinan atau agama lain.¹

Menurut Quraish, faktor keberagaman, selain juga tentunya faktor lainnya seperti; kejiwaan, sosial politik masyarakat, ekonomi, dapat menjadi pemicu ekstremisme. Hal ini disebabkan kesalahpahaman dalam memahami tuntunan agama dan seringkali memahami agama berdasarkan teksnya semata tanpa memahami konteks ayat atau hadis sebagai sumber beragama. Ia juga menyebutkan sejumlah karakter sikap ekstrem diantaranya kebodohan terhadap ajaran agama disertai dengan fanatisme buta atau semangat berlebihan sehingga bertindak melampaui batas.²

Beberapa kasus besar yang mengatasnamakan agama yang pernah terjadi misalnya kasus Poso (sejak 1992 s.d. 2001), kasus yang merupakan bagian dari konflik individu yang pada akhirnya melibatkan unsur budaya, yaitu suku dan agama yang membawa perpecahan umat beragama yang menimbulkan pertumpahan darah di Poso antara Muslim dan Kristen.³ Termasuk konflik yang besar antar agama lainnya adalah konflik agama di Bogor (2000, 2008 s.d. 2012), yang bermula dari gugatan umat Islam yang diwakili oleh Forum Ulama dan Ormas Islam se-kota Bogor tentang izin pembangunan Gereja, namun pada akhirnya kasus meluas sampai ranah politik.⁴ Selain itu juga terdapat konflik intra agama, misalnya antara Sunni dan Syiah di Jawa Timur (peristiwa

¹Lihat, Ahmad Riyadi dan Hendri, "Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia", *Sosiologi Reflektif*, Volume 10, No. 2, April 2016, h. 201.

²M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 110-112.

³Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya", *Substansia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014, h. 222-223.

⁴*Ibid.*

penyerangan Pesantren YAPI yang memiliki paham Syi'ah oleh kelompok Laskar Aswaja Bangil Pasuruan Tahun 2010-2011).⁵ Juga ada kasus Ahmadiyah, dan lain-lain.

Untuk mencegah konflik keagamaan terus terjadi, Kementerian Agama menguatkan wacana moderasi beragama di PTKIN dengan membentuk rumah moderasi beragama⁶, sosialisasi moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan dosen PTKIN serta kegiatan lainnya. Kemenag merumuskan sikap moderat dalam bernegara mencakup empat indikator yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal.⁷ Kemenag juga memetakan sikap beragama dalam tiga bentuk yakni ekstrem/radikal, liberal dan moderat.⁸

Beberapa penelitian terkait sikap beragama pada komunitas dunia pendidikan telah dilakukan. Riset PPIM terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan menengah menemukan bahwa guru cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun non-Islam dan generasi muda rentan dengan ekstremisme dan intoleransi.⁹ Penelitian Nuryadin tentang keberagaman mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menemukan bahwa pemikiran keagamaan mahasiswa cenderung bersifat formalis-tekstualis dan pemahaman keagamaan juga sama bersifat skripturalis-tekstualis.¹⁰ Tipe pemahaman tekstualis-literalis terhadap teks tanpa melihat konteks ini lah yang disinyalir Quraish sering menghasilkan sikap yang radikal. Fenomena ini diperkuat dengan hasil penelitian Setara Institute terkait tipologi beragama mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri yang dua di antaranya adalah PTKIN yakni UIN Bandung dan UIN Jakarta menyatakan bahwa dua PTKIN tersebut tertinggi dalam sikap fundamentalisme, konservatisme dan eksklusivisme beragama mahasiswa.¹¹

Kondisi ini bila dibiarkan dikuatirkan akan memunculkan konflik agama yang tidak diharapkan terutama yang datang dari pemuda aktivis kampus Islam. Penelitian ini meneliti respon aktivis mahasiswa muslim terhadap wacana moderasi beragama, tipologi sikap beragama dan integrasi dan konflik beragama di Kalimantan Selatan. Untuk itu, penelitian ini menarik diteliti.

⁵*Ibid.*

⁶Surat Edaran Dirjen Pendis No. B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.

⁷Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 43.

⁸*Ibid.*, h. 47.

⁹<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33435/4/AWAL%20-20MENANAM%20BENIH%20DI%20LADANG%20TANDUS-3.pdf>

¹⁰Nuryadin, "Keberagaman Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (Perspektif Sosiologi dan Antropologi)", Disertasi pada UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021.

¹¹[Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis \(detik.com\)](https://www.detik.com) diakses pada 29 Oktober 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian memotret keadaan lembaga, masyarakat dan sebagainya berdasarkan fakta yang ditemukan.¹² Penelitian ini akan memetakan respon aktivis mahasiswa muslim terhadap wacana moderasi beragama di Kalimantan Selatan, sikap beragama yang mereka yakini terutama terkait sikap moderat dalam bernegara, toleransi, peniadaan tindak kekerasan dalam konflik agama serta adaptasi terhadap budaya lokal dan bagaimana konflik dapat muncul dari perbedaan pemahaman keagamaan serta diselesaikan. Penelitian ini meneliti empat kampus PTKI di tiga kabupaten yakni UIN Antasari di Kota Banjarmasin, STAI Darul Ulum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan STAI Rakha serta STIQ Amuntai di Hulu Sungai Utara. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang aktif di kegiatan ekstra atau intra kampus. Data digali dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis menggunakan tiga langkah yakni, reduksi data, display data dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut akan memaparkan hasil penelitian dengan fokus pada tiga hal, yakni respon aktivis mahasiswa Muslim di Kalimantan Selatan terhadap wacana moderasi beragama, tipologi sikap beragama dan potensi konflik akibat keragaman pandangan dalam bernegara dan perbedaan agama serta faham keagamaan.

Respon Aktivistis Muslim terhadap Wacana Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa UIN Antasari ditemukan data bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi ekstra atau intra tidak ada kajian atau diskusi tentang moderasi beragama namun terkadang hanya menjadi sisipan pada kegiatan lain seperti dialog lintas iman. Pada organisasi ekstra kampus, IMM membahas isu moderasi beragama dalam kajian manhaj tarjihnya¹³ sedang PMII menjadi materi khusus pada Latihan Kader. Meski demikian, seluruh mahasiswa baru yang masuk program ma'had akan mendapat materi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Rumah Moderasi.¹⁴ Mahasiswa UIN Antasari menyatakan setuju dengan konsep moderasi beragama yang dipahaminya sebagai sikap beragama yang meski berbeda keyakinan tetapi hidup dalam satu negara, sebagaimana dikemukakan oleh Suryadi. Moderasi juga dipahami sebagai jalan tengah dan tidak ekstrem kanan atau kiri, sebagaimana dikemukakan Ahmad Sunir

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 63.

¹³Wawancara dengan Muhammad Taufiq Rajabbianur

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Suryadi dan Ahmad S. Mahaputra

dan Mahaputra.¹⁵ Sementara itu, Mutia Nabila, menyatakan moderasi beragama adalah sikap menghormati dan tidak menjudge orang lain.¹⁶

Organisasi mahasiswa ekstra dan intra kampus di STAI Darul Ulum Kandangan juga tidak mengkaji secara khusus moderasi beragama. Namun hampir semua aktivis mahasiswa pernah mendengar istilah moderasi beragama baik di organisasi maupun di luar organisasi. M. Faullidy mengatakan bahwa moderasi beragama menjadi bagian materi pada kegiatan organisasi.¹⁷ Namun sebagian belum pernah mendengar istilah tersebut seperti yang dikemukakan oleh Norshifa dan Ahmad Zaini.¹⁸

Mahasiswa aktivis di STIQ Amuntai mayoritas tidak mengetahui istilah moderasi beragama. Hanya Rizki yang menyatakan mengetahui istilah tersebut dari seminar di luar kampus. Namun mereka setuju dengan moderasi dalam makna toleransi beragama dan bukan mengikuti agama orang lain. Ini sebagaimana yang dikemukakan Zia, Nazar, Fadli. Namun mereka setuju dengan moderasi dalam arti menghargai dan tidak dengan arti mengikuti agama lain.¹⁹

Mahasiswa aktivis di STAI Rakha juga mengatakan hal sama bahwa bahasan tentang moderasi beragama tidak menjadi diskusi khusus di organisasi ekstra maupun intra kampus. Namun bahasan tentang toleransi beragama ada pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dan disinggung sekilas dalam ruang perkuliahan. Kampus juga pernah menyelenggarakan seminar terkait moderasi beragama dengan tema Kajian Ilmu-ilmu Syariah dan Implikasinya dalam Penguatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan pada 19 September 2022. Meski tidak ada kajian khusus moderasi namun tidak ada gejala perilaku keagamaan mahasiswa yang ekstrem dan menyimpang.²⁰

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak mengetahui istilah moderasi beragama. Hal ini dikarenakan tidak adanya kajian atau seminar yang dilaksanakan di kampus atau menjadi bahan diskusi di organisasi intra dan ekstra kampus. Mahasiswa yang mengetahui moderasi didapatkan dari keikutsertaan mereka di luar kampus. Namun hal ini berbeda dengan mahasiswa UIN Antasari dimana mayoritas mereka mengetahui dan memahami moderasi beragama karena adanya Rumah Moderasi yang memberikan materi moderasi beragama untuk mahasiswa baru yang mengikuti program ma'had. Moderasi beragama dipahami mahasiswa dengan istilah toleransi dalam pengertian menghargai perbedaan agama dan faham keagamaan. Dengan makna ini mereka setuju dengan moderasi beragama.

¹⁵Wawancara dengan Ahmad Sunir Ridha

¹⁶Wawancara dengan Mutia Nabilla

¹⁷Wawancara dengan Muhammad Faullidy

¹⁸Wawancara dengan Norshifa dan Ahmad Zaini

¹⁹Wawancara dengan Rizki, Zia, Nazar dan Fadli

²⁰Wawancara dengan Wakil Ketua III Stai Rakha Amuntai Syamsul Rahmi pada 1 Juli 2023.

Tipologi Sikap Beragama Mahasiswa Aktivistis Muslim

Moderasi beragama dalam konteks bernegara mencakup empat indikator yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Uraian berikut akan menguraikan sikap beragama mahasiswa dengan empat indikator di atas dengan tiga tipologi beragama yakni moderat, ekstrem dan liberal.

1. Sikap Moderat

Komitmen Kebangsaan

Sikap moderat dalam komitmen kebangsaan adalah menerima Pancasila sebagai ideologi negara, Konstitusi UUD 1945 dan regulasi yang ada di bawahnya.²¹ Menurut Suryadi, antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan termasuk ketaatan pada undang-undang. Pancasila sebagai ideologi negara sudah final. Sunir, mahasiswa UIN Antasari, setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara dan menurutnya tidak bertentangan dengan nilai agama. Bahkan ia tidak setuju bila bentuk pemerintahan demokratis diganti dengan khilafah. Nazawa, menurutnya, meskipun demokrasi berbeda dengan musyawarah dalam Islam namun tetap wajib mentaati undang-undang. Pendapat serupa juga dikemukakan Shofa, Azmi dan lainnya.

Mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum Kandangan seluruhnya menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan nilai Islam. Humaidi menyatakan bahwa Indonesia memang tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam tetapi karena yang memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya satu agama saja. Di sini ia nampak setuju dengan pemberlakuan undang-undang negara yang mewadahi seluruh agama di Indonesia. Dalam menghormati simbol negara seperti Bendera Merah Putih, Zaini menyatakan boleh sebagai bukti kecintaan pada tanah air.²²

Mahasiswa aktivis STIQ Amuntai menyatakan bahwa sistem demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan Islam. Negara menyatu dengan agama yang dibuktikan dengan kesesuaian antara nilai Pancasila dengan nilai Islam seperti Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya agama diakui oleh negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Nazar. Ia tidak setuju undang-undang diubah menjadi hukum Islam karena Indonesia memiliki beragam agama dan budaya. Syam tidak setuju adanya perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi Khilafah karena akan memicu konflik dari umat beragama.

Mahasiswa aktivis STAI Rakha menyatakan antara negara dan agama tidak bertentangan baik terkait nilai Pancasila maupun simbol negara seperti hormat pada Bendera Merah Putih. Begitu juga sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Rahmatillah, mengganti sistem demokrasi dengan

²¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 43.

²²Wawancara dengan mahasiswa STAI Darul Ulum Kandangan.

khilafah untuk kasus di Indonesia tidak bisa dilaksanakan dan ia tidak setuju. Ini juga diamini oleh Lukman dan menurutnya, demokrasi adalah paling ideal dibanding sistem lainnya. Helda juga berpendapat serupa. Baginya, sulit menerapkan sistem khalifah di negara kita karena kita sudah terbiasa dengan sistem demokrasi dan akan memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat bila hukum yang berlaku adalah hukum Islam.²³

Pandangan aktivis mahasiswa yang ada di UIN Antasari Banjarmasin, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai dan STAI Rakha Amuntai menunjukkan sikap moderat dalam bernegara. Mereka menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang sebagai hukum negara dan lambang negara seperti bendera Merah Putih dan lainnya. Sikap dan pandangan yang menyatakan bahwa konstitusi negara sesuai dengan Islam dan menolak perubahan sistem bernegara menjadi khilafah atau mengubah undang-undang dan hukum yang berlaku di negara menjadi hukum Islam merupakan sikap moderat.

Toleransi

Toleransi berarti sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini baik terhadap antar maupun intra agama. Toleransi juga berarti sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan lembut dalam menerima perbedaan serta hormat dan menerima orang yang berbeda dan berpikir positif.²⁴ Dalam konteks toleransi antar agama dapat dinilai dari kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah serta kesediaan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Toleransi intra agama dilihat dari sikap terhadap sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama.²⁵

Bagi aktivis mahasiswa UIN Antasari, perbedaan tidak dapat dihindari namun tidak boleh memaksakan atau mendiskreditkan pihak lain. Misalnya, perbedaan masalah qunut subuh antara NU dan Muhammadiyah hanya perbedaan referensi saja sementara tujuannya sama yakni beribadah. Pendapat ini dikemukakan oleh Suryadi. Pihak Pemuda Ansor yang mengawal gereja pada saat kebaktian, menurutnya, sebagai wujud dari toleransi beragama. Sebatas menjaga agar ibadah umat minoritas merasa aman dalam ibadahnya. Namun kita tetap menjaga keyakinan dan keimanan kita. Toleransi ini, menurutnya, sebagai bentuk kemanusiaan bukan toleransi dalam akidah. Termasuk sikap terhadap Syiah dan Ahmadiyah, sikap moderat dalam hal kemanusiaan dan tidak dengan akidah. Namun berbeda dengan LGBT yang merusak kehidupan sosial masyarakat harus dicegah.²⁶

²³Wawancara dengan mahasiswa STAI Rakha Amuntai.

²⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 44.

²⁵Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 45.

²⁶Wawancara dengan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Menurut mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum Kandangan bahwa perbedaan dalam pengamalan keagamaan di antara madzhab adalah rahmat, tidak dianggap sebagai kesesatan. Bahkan beberapa aktivis mengaku terbiasa bergaul dengan mereka yang berbeda agama, misalnya di Loksado. Harus saling menghormati dan rukun. Adapun terkait LGBT sudah jelas suatu penyimpangan termasuk Syiah, dan lainnya, hanya saja tetap mengedepankan *husn azh-zhann*.

Menurut mahasiswa STIQ Amuntai bahwa perbedaan ini memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih paham mana yang akan diikuti. Tidak fanatik sehingga memunculkan ucapan 'bid'ah' yang cukup meresahkan, pengajian yang sering menyinggung kelompok lain, misalnya dengan menilai sesat atau lainnya bisa mengakibatkan kekerasan bila ada yang memprovokasi.

Respon yang sama juga ditunjukkan oleh mahasiswa aktivis STAI Rakha Amuntai, terhadap nonmuslim tidak ada masalah dan tidak ada kekuatiran, saling menghargai. Namun mereka menambahkan bahwa yang dikuatirkan adalah toleransi sesama muslim, karena berbeda cara beribadah berpotensi saling menyalahkan. Tentang mengucapkan selamat natal, itu haram. Akan tetapi ada juga yang mengatakan tidak mengapa jika dalam keadaan apabila kita tidak mengucapkannya maka akan mengurangi rasa kebersamaan antar umat beragama dan bila kita mengucapkannya tetapi tidak mengimaninya dan tujuannya untuk penghormatan.

Uraian di atas tidak ditemukan indikasi sikap ekstrem sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qardhawi yakni: (1) fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat lain; (2) mewajibkan atas orang lain sesuatu yang tidak diwajibkan Allah atas mereka; (3) memperberat yang tidak pada tempatnya; (4) sikap kasar dan keras; (5) buruk sangka terhadap orang lain; dan (6) terjerumus pada jurang pengafiran.²⁷ Juga tidak terdapat indikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab yang berpandangan bahwa sikap ekstrem ini muncul disebabkan kebodohan terhadap ajaran agama, ketidakhati-hatian membaca situasi yang disertai fanatisme buta dengan gejala ekstrem yang terlihat dari sikap: 1). Menolak berdiskusi; 2). Berpandangan bahwa kebenaran hanya miliknya sedangkan yang lain adalah salah; 3). Menganggap bahwa segala persoalan telah selesai, adapun jika belum maka haruslah merujuk kepada sumber yang dia gunakan; 4). Menolak kehadiran apa pun dan siapa pun yang berbeda dengan mereka; 5). Boleh jadi mereka tekun dalam ibadah, akan tetapi sering berburuk sangka dan jauh dari sikap dan akhlak islami.²⁸

Toleransi dalam pemahaman mahasiswa aktivis tidak selalu dipahami dengan saling mengucapkan "selamat" (terutama berkaitan dengan hari-hari besar agama), akan tetapi lebih kepada saling menjaga dan menghormati, memberikan kebebasan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pandangan ini sesuai dengan rumusan Kemenag, yaitu 'tidak mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agama demi toleransi yang tidak pada

²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Islam Ekstrem: Analisis dan...*, h. 32-46.

²⁸M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam...*, h. 113-115.

tempatnyanya kepada pemeluk agama lain.²⁹ Bersikap moderat berarti tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama dan mana tafsir ajaran agama. Di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan mana yang tidak.³⁰

Dari uraian di atas, maka secara umum mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan memiliki pemahaman dan sikap yang sangat moderat. Moderat dalam beragama ditandai dengan: 1). Memiliki pengetahuan yang luas; 2). Mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas; dan 3). Selalu hati-hati. Secara sederhana, moderat menuntut tiga syarat, yakni: berilmu, berbudi dan berhati-hati.³¹

Anti Kekerasan

Mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan (UIN Antasari, STAI Darul Ulum Kandangan, STIQ Amuntai dan STAI Rakha Amuntai) sangat toleran terhadap berbagai isu-isu keagamaan, sehingga terhadap hal yang berbeda pun tidak mengedepankan sikap kekerasan. Sebaliknya mereka mengedepankan sikap yang baik, saling menghormati, selama tidak ada yang memulai untuk menyulut konflik dengan mengatakan sesat atau *bid'ah*.

Menurut mahasiswa aktivis UIN Antasari, bahwa kita perlu bersikap netral, tidak mengolok-olok, mempergunjingkan, apalagi sampai membuli, terlebih lagi sampai menyakiti fisik. Berdebat atau diskusi dibolehkan saja, asal dalam rangka adu argumentasi yang disertai dengan keterangan dan alasan yang tepat. Undang-undang saja tidak memperbolehkan kekerasan, apalagi dalam Islam. Hal yang sama juga disampaikan oleh mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum, STIQ Amuntai, dan STAI Rakha Amuntai. Hanya saja apabila yang memprovokasi, maka harus ditindak aparat sesuai dengan hukum.

Dari uraian di atas, maka secara umum mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan memiliki sikap anti terhadap ekstremisme dan kekerasan.

Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Sikap moderat terhadap indikator akomodatif pada budaya lokal dapat dilihat dalam bentuk kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Sikap moderat juga ditunjukkan dengan kecenderungan lebih ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.³²

Menurut mahasiswa aktivis UIN Antasari, bahwa terhadap budaya lokal, maka penting untuk memahami secara menyeluruh dan menyentuh hal-hal yang bersifat substansi, tidak hanya di

²⁹Badan Litbang, *Moderasi Beragama...*, h. 7.

³⁰Badan Litbang, *Tanya Jawab...*, h. 18.

³¹*Ibid.*, h. 20

³²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 46

permukaan saja. Hal terpenting adalah tidak bertentangan dengan agama atau nilai agama (al-Qur'an dan Hadits), selain itu budaya tetap diposisikan sebagai budaya atau tradisi saja yang bukan bagian dari agama, serta tidak dijadikan sebagai keyakinan, misalnya anggapan kalau tidak melaksanakan ini, maka akan terjadi begini. Selain itu terkait pelaksanaan ritualnya, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka perlu untuk diluruskan.

Menurut mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum Kandangan, budaya lokal tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang saja, harus dikaji terlebih dahulu karena barangkali ada dasar rujukannya. Budaya tidak menjadi masalah selama tidak merugikan dan berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat. Selain itu budaya atau adat istiadat tergantung makna dan tujuannya, meluruskan adat istiadat tersebut dengan nilai-nilai Islam. Budaya sebagaimana dicontohkan oleh para wali (wali songo) yang berdakwah di nusantara, menjadikan budaya sebagai alat atau sarana untuk berdakwah. Memasukkan unsur-unsur agama di dalam tradisi untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini penting disadari oleh para pendakwah atau pemuka agama, jika pemuka agama keras dengan budaya, maka akan memunculkan konflik di masyarakat.

Sedangkan menurut mahasiswa aktivis STIQ Amuntai budaya adalah salah satu faktor yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat jika tidak diterima. Perbedaan budaya tidak harus saling menyingkirkan. Budaya dapat diterima sejauh apabila sejalan dengan agama Islam namun bila bertentangan atau bahkan mengandung kesyirikan maka akan ditolak. Namun bila yang melakukan budaya yang dilarang Islam itu dari nonmuslim maka biarkan saja dan bila yang melakukannya adalah muslim maka dinasihati dan tidak perlu tindakan kekerasan. Termasuk budaya juga memperhatikan hukum fiqh, misalnya menurut aurat.

Adapun menurut mahasiswa aktivis STAI Rakha Amuntai, budaya itu tidak ada masalah selama tidak terkait dengan akidah atau bertentangan dengan syariat. Budaya yang bertentangan dengan agama perlu diubah seperti halnya wayang pada masa Wali Songo yang budayanya diisi dengan nilai Islam. Budaya itu tidak masalah karena melakukannya sesuai dengan keyakinan masing-masing orang. Apabila pemuka agama keras dengan budaya maka akan ada konflik di masyarakat antara agama dan budaya.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa rumusan sikap mereka terhadap budaya lokal sebagai berikut:

- a. Sangat penting untuk memahami secara menyeluruh dan menyentuh hal-hal yang bersifat substansi, tidak hanya di permukaan saja;
- b. Hal terpenting adalah tidak bertentangan dengan agama atau nilai agama (al-Qur'an dan Hadits);

- c. Budaya tetap diposisikan sebagai budaya atau tradisi saja, bukan bagian dari agama, serta tidak dijadikan sebagai keyakinan, misalnya anggapan kalau tidak melaksanakan ini, maka akan terjadi begini.
- d. Terkait pelaksanaan ritualnya, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka perlu untuk diluruskan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama pendahulu (Wali Songo).
- e. Selama budaya itu tidak merugikan dan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat, maka tidak apa-apa.

Kelima rumusan di atas akan terlihat juga pada sikap Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menyangkal keabsahan beberapa ritual atau tradisi, misalnya Ritual Manyanggar Banua, Upacara Badudus, Upacara mengantar sesajen (Ancak), Upacara Wayang Sampir, Upacara Manopeng, Upacara Mandi-Mandi Tujuh Bulan (Badudus), dan Memelihara Buaya dengan menekankan akan pemurnian akidah Islam (Aspek Tauhid). Selain itu menurutnya, upacara ritual beberapa ritual seperti menyanggar banua dan membuang pasilih termasuk bid'ah saiyyah (bid'ah dhalalah) yang sangat bertentangan dengan Al Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan Ijma Ulama. Karena di dalam upacara itu terdapat beberapa macam kemungkaran.³³

Uraian di atas menggambarkan bahwa mahasiswa aktivis Muslim dapat mengakomodir budaya dengan merujuk kepada pendapat para ulama terdahulu semisal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

2. Sikap Ekstrem

Sikap ekstrem atau radikal dipahami dengan ideologi yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran dalam waktu singkat dan drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme dapat muncul karena adanya ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang.³⁴ Sikap ekstrem tidak nampak ada pada mahasiswa yang diwawancarai. Pada indikator komitmen kebangsaan, tidak ada yang menyatakan perlunya Indonesia beralih dari sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem khilafah, hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan negara menjadi hukum yang berdasarkan syariah. Demikian juga pada sikap toleransi beragama. Mereka menerima adanya perbedaan baik atas dasar agama, pemahaman agama, kepercayaan dan budaya. Perbedaan itu, menurut mereka, tidak perlu dipaksakan untuk disatukan sehingga mendatangkan perpecahan dan konflik. Seperti adanya

³³Syarifuddin, "Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan ...", 57.

³⁴Siti Khusniyati Sururiyah dan Yunita Furi Aristyasari, Upaya Menangkal Potensi Radikalisme Melalui Pendekatan dan Model Pendidikan Agama Islam, *Proceeding: The Annual Conference on Islamic Religious Education*, Perhimpunan Prodi PAI Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 45

perbedaan agama dan pemahaman terhadap agama. Perbedaan dapat diselesaikan dengan dialog dan saling memahami namun bila menimbulkan konflik maka tugas pemerintah untuk menyelesaikannya.

3. Sikap Liberal

Dalam bidang politik, sikap liberal berupaya memisahkan antara politik dan agama. Urusan politik diserahkan kepada para politisi sementara agama hanya mengurus urusan ritual umat beragama. Sikap ini juga disebut dengan sekular. Presiden Soeharto menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan Indonesia bukan negara teokrasi atau pemerintahan yang berdasarkan agama namun juga bukan negara sekular yang memisahkan negara dengan agama.³⁵ Sementara itu, penganut liberal dengan paham sekularnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholish bahwa seluruh kehidupan dunia termasuk politik harus dipisahkan dari agama. Pandangan ini ditantang oleh al-Attas dimana menurutnya ajaran Islam mengharuskan umat Islam dalam segala hal termasuk politik mesti terkait dengan agama.³⁶

Para mahasiswa aktivis sepakat bahwa antara Islam dan negara tidak ada pertentangan sehingga tidak perlu dipisahkan sebagaimana yang menjadi pandangan politik liberalis. Agama menyatu dalam kehidupan masyarakat baik sosial, budaya dan politik. Memisahkan keduanya tidak sejalan dengan nilai budaya bangsa Indonesia.

Integrasi dan Konflik dalam Beragama

Ada dua teori yang dikemukakan oleh sosiolog tentang konflik yakni teori integrasi dan konflik. Teori integrasi diantaranya dikemukakan oleh Dahrendorf yang mengandaikan masyarakat selalu dalam keteraturan dan berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing individu dalam masyarakat. Karenanya teori ini disebut juga dengan struktural fungsional. Sementara teori konflik yang diantaranya dikemukakan oleh Karl Marx dan Lewis Al Cozer menyatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam konflik karena adanya perbedaan otoritas di masyarakat sehingga menghasilkan struktur sosial kelas atas dan bawah atau superordinasi dan subordinasi. Meski pun pasca konflik, kedua teori tersebut menyatakan bahwa masyarakat akan kembali teratur baik dengan adanya ekuilibrium dalam teorinya struktural fungsional atau negosiasi dengan ‘paksaan’ atau koersi hingga mencapai consensus dalam teorinya konflik.

Mahasiswa aktivis dalam beberapa kasus memang terlihat tegas, misalnya LGBT yang dianggap salah oleh mereka, hanya saja mereka tidak sepakat diselesaikan dengan kekerasan, terkecuali dengan terpaksa. Kasus ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab konflik adalah

³⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Akar, Sejarah...*, h. 193.

³⁶Samsudin dan Nina Herlina Lubis, “Sejarah Munculnya Pemikiran...”, h. 493-494.

sesuatu yang berbeda dari nilai yang dimiliki oleh masyarakat secara umum, termasuk gejala kelompok yang senang membida'ahkan, Syiah dan Ahmadiyah.

Hal ini berkesesuaian dengan teori-teori konflik yang menekankan dominasi terhadap beberapa kelompok sosial oleh kelompok-kelompok lain; melihat tatanan sosial didasarkan pada manipulasi dan pengendalian yang dilakukan kelompok-kelompok yang dominan; dan melihat perubahan sosial terjadi secara cepat dan dalam bentuk yang kacau seperti kelompok-kelompok subordinat menumbangkan kelompok-kelompok dominan.³⁷

Secara sederhana bahwa konflik muncul disebabkan adanya pertentangan yang mengganggu stabilitas yang kemudian direspon oleh masyarakat. Di dalam teori integrasi menyatakan bahwa masyarakat merupakan satu sistem saling terkait dan memiliki mekanisme struktur sosial tersendiri yang cenderung statis untuk menjaga keseimbangan. Adanya perubahan yang cepat dan singkat pada masyarakat dapat merusak sistem dan apabila masyarakat belum siap atau belum menerima maka dapat mengakibatkan goncangan masa depan (*future shock*) atau disebut juga dengan *culture shock*.³⁸

Sebagai bagian dari masyarakat, maka mahasiswa aktivis memberikan respon terhadap penyelesaian konflik sebagai berikut:

Menurut mahasiswa aktivis UIN Antasari cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan diskusi, mediasi, mencari titik permasalahannya, mempertemukan keduanya dalam situasi yang damai, selain itu harus dengan musyawarah, mencari orang yang lebih paham tentang konflik tersebut, termasuk harus ada pihak ketiga yang ikut mendamaikan.

Sedangkan menurut mahasiswa aktivis STAI Darul Ulum Kandangan, bahwa selalu ada konflik yang terjadi sejak zaman dahulu, maka solusinya adalah memberikan contoh yang terbaik, menunjukkan perilaku keagamaan yang baik yang menunjukkan bahwa Islam menyatukan dan merangkul, bukan menyebabkan perpecahan/pemecah belah, harus sering melakukan diskusi dan duduk bersama dengan mereka yang berbeda, hal ini misalnya dapat disebarluaskan di media sosial, serta harus ada mediasi dari pihak yang netral.

Demikian juga disampaikan oleh mahasiswa aktivis STIQ Amuntai bahwa tidak perlu saling menyalahkan, tetapi perlu tabayun, perlu ruang untuk membahas perbedaan dan perlu ruang diskusi untuk mencari titik temu. Akan tetapi aktivis STAI Rakha Amuntai menambahkan bahwa ungkapan pelaku bid'ah dari kelompok lain terhadap yang lainnya dianggap sebagai provokasi yang tidak bisa dibiarkan dan bila menimbulkan gejolak, maka pemerintah perlu mengambil tindakan untuk meredam itu.

³⁷George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi ...*, h. 400.

³⁸Andina Prasetya dll., "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi ...", h. 935.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik menurut mahasiswa aktivis di Kalimantan Selatan, yaitu *pertama*, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan santun sesuai dengan ajaran agama, tidak melakukan kekerasan; *kedua*, perlu *tabayyun* atau ruang diskusi untuk merumuskan titik temu; *ketiga*, adanya mediasi, difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang netral; dan *keempat*, menghadirkan tokoh-tokoh yang dapat mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut; serta *kelima*, menempuh jalur hukum jika terpaksa.

Melihat rumusan sebagaimana di atas, maka sebagaimana Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu:

- a. Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
- b. Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang menda-lam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
- c. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Respon mahasiswa aktivis muslim di Kalimantan Selatan tentang wacana moderasi beragama menunjukkan respon yang positif, secara umum mahasiswa aktivis mengenal istilah moderasi yang mereka maknai dengan toleransi. Hanya saja mereka tidak mampu menjelaskan secara lebih detail tentang konsep moderasi beragama tersebut.
2. Peta pemahaman moderasi beragama para aktivis muslim di Kalimantan Selatan dalam kategori moderat, hal ini ditunjukkan pada adanya indikator sikap moderat yang mencakup: 1) adanya komitmen kebangsaan; 2) adanya sikap toleransi terhadap perbedaan intra dan antar agama; 3) anti ekstremisme/kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap budaya lokal.
3. Integrasi dan konflik dalam kaca mata mahasiswa aktivis muslim di Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *pertama*, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan santun sesuai dengan ajaran agama, tidak melakukan kekerasan; *kedua*, perlu *tabayyun* atau ruang diskusi untuk merumuskan titik temu; *ketiga*, adanya mediasi, difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang netral; dan *keempat*, menghadirkan tokoh-tokoh yang dapat

³⁹Ellya Rosana, Konflik pada Kehidupan Masyarakat..., 227.

mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut; serta *kelima*, menempuh jalur hukum jika terpaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nuryadin, "Keberagamaan Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (Perspektif Sosiologi dan Antropologi)", Disertasi pada UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, terj. Alwi AM, Cet. V; Bandung: Mizan, 1992.
- Prasetya, Andina, dll., "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, UPI, no. 1, 2021
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu dll. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Riyadi, Ahmad, dan Hendri, "Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia", *Sosiologi Reflektif*, Volume 10, No. 2, April 2016.
- Rosana, Ellya, Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern), *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 10, No. 2, Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, thn 2015.
- Samsudin dan Nina Herlina Lubis, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970-2023", *Patanjala*, vol. 11, No. 3 September 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Akar, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Surat Edaran Dirjen Pendis No. B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.
- Sururiyah, Siti Khusniyati dan Yunita Furi Aristyasari, Upaya Menangkal Potensi Radikalisme Melalui Pendekatan dan Model Pendidikan Agama Islam, *Proceeding: The Annual Conference on Islamic Religious Education*, Perhimpunan Prodi PAI Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2022
- [Survei Setara Institute Sebut Mahasiswa Kampus-kampus Ini Fundamentalis \(detik.com\)](#) diakses pada 29 Oktober 2023.
- Syarifuddin, "Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar," *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 12 No. 24 Desember 2013.
- Yunus, Firdaus M., "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya", *Substansia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2014.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33435/4/AWAL%20-20MENANAM%20BENIH%20DI%20LADANG%20TANDUS-3.pdf>